

**ADVOKASI INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATION (COMMITTEE TO PROTECT JOURNALIST) DALAM
MENGAKHIRI KASUS IMPUNITAS DAN KEKERASAN PELAKU
KRIMINALITAS TERHADAP JURNALIS DI MEXICO PADA TAHUN
2014-2018**

Fitria Annisa Bestary

International Relations Department, Social & Political Science Faculty, Muhammadiyah University of Yogyakarta, Bantul, DIY, 55183
fitriabestary@gmail.com

Abstract

Journalists are one of the most important factors in a condition of a country in terms of security and politics, every journalists report or inform to the public about what happens in accordance with the existing code of ethics. The freedom of expression in a country are considered to be achieved if the journalists get their rights to do their jobs safely. Mexico's press is caught in a deadly cycle of violence and impunity, with journalists in Veracruz state at particular risk of kidnap and murder. Despite authorities appointing a special prosecutor to investigate crimes against freedom of expression and establishing a protection mechanism for journalists, a lack of political will to end impunity exposes Mexico as one of the most dangerous countries in the world for journalists. Within five years there were at least 36 journalists killed related to their job as a Journalist. Those cases are become international issues and Committee to Protect Journalist became one of the actor who are trying to overcome the problems. Using the Transnational Advocacy Network concept by Keck and Sikkink this undergraduate thesis are trying to explain how Boomerang Pattern, The Typology of Network Strategy, and Public Policy Analysis works on the Advocacy Committee to Protect Journalist to End Impunity and Violence Against Journalist in Mexico.

Keywords: *Mexico, Latin America, Journalism, Violence Against Journalist, Transnational Advocacy Network, Committee to Protect Journalist.*

Latar Belakang

Kongres menyatakan sebuah keprihatinan yang semakin meningkat tentang kebebasan pers di Meksiko. Hal ini menarik perhatian pihak asing untuk membantu pemerintah Meksiko dan masyarakat sipil untuk melindungi jurnalis dengan lebih baik dan menghilangkan impunitas dalam kasus-kasus kejahatan yang dilakukan terhadap mereka para Jurnalis (Marco, 2018). Pemerintah AS telah berfokus kepada penguatan upaya terhadap pemerintah Meksiko untuk melindungi jurnalis dan menyatukan para jurnalis, para pemilik media, para masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memiliki peran dalam memantau dan meningkatkan upaya perlindungan dan penuntutan terhadap pelanggaran yang terjadi (Gracia., 2018).

Dalam data statistik yang diinformasikan oleh CPJ langsung pada website resminya dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah tercatat sembilan-belas jurnalis yang terbunuh di Meksiko. Kasus pembunuhan terhadap jurnalis di Meksiko tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 6 korban yang terbunuh dan telah terkonfirmasi motifnya dalam kurun waktu satu tahun saja, tahun 2017 menjadi tahun dengan rekor tertinggi di Meksiko dalam sejarah pembunuhan terhadap jurnalis. Dalam hal ini CPJ mengupayakan untuk terus mendorong pemerintah Meksiko agar lebih memperhatikan terhadap hal yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan penegakan hukumnya dalam mengurangi impunitas terhadap para pelaku kekerasan terhadap jurnalis.

Dalam usahanya CPJ mengupayakan sebuah kampanye anti impunitas. Angka impunitas di Meksiko telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Mengambil informasi dari surat kabar El Universal Meksiko menduduki peringkat ke empat dunia dan mencapai level tertinggi di benua Amerika dalam kasus impunitas.

Impunitas sistemik telah mengakar di tingkat negara bagian dan lokal di mana sebagian besar kejahatan anti-persidangan diselidiki. Sistem peradilan pidana telah gagal untuk berhasil menuntut lebih dari 90 persen kejahatan terkait pers selama dekade terakhir, penelitian CPJ menunjukkan. Meksiko menempati peringkat kesembilan terburuk di dunia berdasarkan Indeks Impunitas CPJ, yang menghitung jumlah pembunuhan jurnalis yang belum diselesaikan sebagai persentase dari populasi suatu negara

Dalam kasus demi kasus, CPJ telah menemukan pekerjaan yang tidak semestinya oleh jaksa dan polisi negara. Pihak berwenang telah menggunakan metode yang melanggar hukum, termasuk paksaan terhadap saksi dan pemalsuan bukti, pada beberapa kesempatan, dan terdapat sistem peradilan dikendalikan oleh para pelaku kriminalitas.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kali ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis akan mencoba untuk mengeksplorasi upaya suatu organisasi transnasional dan korporasi dalam mengatasi isu pekerja di Bangladesh. Dengan cara mendeskripsikan dan menganalisa serta mengkorelasikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit

yang diteliti antara fenomena yang diuji. Pengambilan data dalam penelitian kali ini diambil dari data tertulis yang bersumber dari laporan, berita, jurnal, dan buku.

Selanjutnya, penulis akan mendeskripsikan fakta secara apa adanya, dengan cara dipilah, dikategorisasi, diinterpretasi, dan dipaparkan untuk mendapat gambaran yang ada untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah disebutkan.

A. Kerangka Teori

Dalam proses penulisan ini, penulis akan menggunakan teori yang relevan untuk penjelasannya. Sebagai kerangka dasar dari pemikiran dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan kerangka Teori dari Keck & Sikkink tentang *Transnational Advocacy Network (TAN)*

Teori *Transnational Advocacy Network (TAN)*

Dalam dunia internasional Keck dan Sikkink memandang bahwa beberapa aktor internasional telah berinteraksi antar satu sama lain dan membentuk sebuah jaringan. Beberapa di antaranya adalah jaringan ilmuwan dan pakar yang memiliki ikatan profesional dan gagasan kausal yang dijadikan sebagai penopang untuk mempengaruhi kebijakan mereka (Haas, 1992).

Para aktor tersebut membahas suatu isu yang ada di skala internasional, mereka disatukan dalam wadah yang sama dan mereka bekerja sama untuk mengangkat sebuah isu yang berkaitan dengan norma atau fenomena terbaru. Selanjutnya adalah jaringan aktivis, dimana yang sebagian besar dibedakan oleh gagasan atau nilai-nilai berprinsip dalam memotivasi pembentukan diri mereka (Judith Goldstein and Robert Keohane, 1993). Keck dan Sikkink menyebutnya sebagai Jaringan Advokasi Transnasional.

Menurut Keck dan Sikkink suatu organisasi memiliki sebuah karakter komunikasi yang pertukarannya bersifat sukarela, horisontal, dan memiliki timbal balik (Sikkink, 2014). Sebuah jaringan muncul untuk merubah perilaku negara dan organisasi internasional ketika hubungan antara masyarakat sipil dan pemerintah tidak terakses secara baik. Keck dan Sikkink memberikan nama hal tersebut sebagai *Boomerang Pattern*, ketika penutupan akses kepada pemerintah terjadi maka para aktivis akan mencari sebuah dukungan dari luar negeri. Selain penutupan akses ke pemerintah, aktivis malah justru menjadikan jaringan tersebut sebagai tujuan perjuangan mereka, karena mereka percaya bahwa interaksi internasional akan tumbuh ketika sebuah jaringan terbentuk dan semakin kuat.

Ada yang menjadikan para aktor-aktor dalam konsep ini menjadi istimewa dan patut diperhitungkan, dimana mereka menggunakan soft power dan cenderung tidak menggunakan kekuatan fisik secara langsung seperti yang ekonomi dan militer lakukan, mereka menggunakan pengaruh mereka sebagai kekuatan.

Cara mereka melakukan advokasi pun menggunakan latar belakang tentang isu-isu yang terbaru dan secara khusus, sehingga hal tersebut menjadi sebuah ketertarikan dan menjadi pengaruh terhadap partisipasi dalam setiap kampanye yang mereka buat. Pada umumnya sebuah kebijakan hanya dibuat oleh pemerintah atau aktor

tradisional, namun dengan adanya aktor pejuang advokasi atau para aktivis tersebut mereka dapat masuk dan membuka peluang untuk ikut serta membuat sebuah kebijakan. Dimana hal tersebut menjadikan *Transnational Advocacy Network* berperan untuk mengangkat sebuah isu dari masyarakat agar nantinya diperhatikan dan didengar oleh pemerintah.

Dalam mencari sebuah pengaruh sebuah jaringan transnasional menggunakan cara yang sama seperti kelompok politik atau gerakan sosial lainnya lakukan, tetapi karena mereka tidak kuat dalam pengertian tradisional, mereka harus menggunakan kekuatan informasi, ide, dan strategi mereka untuk mengubah informasi dan konteks nilai di mana negara membuat sebuah kebijakan (Sikkink, 2014).

a. Strategi Jaringan

Keck dan Sikkink telah mengembangkan tipologi yang bernuansa tentang jenis taktik atau strategi yang digunakan jaringan untuk menganalisa proses advokasi dan strategi tersebut terbagi menjadi empat: *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, dan *Accountability Politics*.

Information Politics merupakan kemampuan tentang mobilisasi sebuah informasi politik agar dapat memberikan sebuah pengaruh yang besar

Symbolic Politics adalah sebuah kemampuan untuk menggunakan simbol atau menyampaikan secara simbolik lebih tepatnya adalah ikon atau mengadakan suatu event untuk menjadi gambaran atau perwakilan dari suatu isu, hal tersebut dapat dilakukan juga secara narasi dan tindakan atas sebuah situasi yang dialami masyarakat yang memungkinkan untuk menarik simpati dari publik yang tidak hanya berada di lingkungan sendiri namun transnasional.

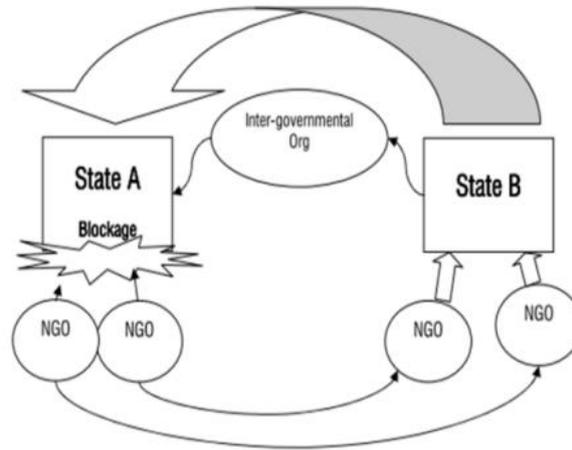
Leverage Politics merupakan kemampuan yang menggunakan seorang aktor yang berpengaruh atau yang kuat untuk dapat memberi kekuatan atau pengaruh kepada masyarakat luas agar mendapatkan sebuah dukungan dalam setiap pergerakan sebuah jaringan tersebut. Dalam *leverage politics* ini terdapat dua jenis pengaruh yaitu *material leverage* dan *moral leverage*.

Accountability Politics adalah upaya untuk mendorong aktor yang lebih kuat lagi untuk bertindak dalam sebuah kebijakan yang cenderung samar dan atau kebijakan yang sudah mereka ambil sebelumnya.

b. Boomerang Pattern

Dalam kerangka konseptual ini penulis mengambil pokok bahasan tentang bagaimana sebuah jaringan advokasi transnasional dapat mempengaruhi sebuah kebijakan dalam negara yang memiliki isu khusus. Melalui *boomerang pattern* dimana keterbukaan informasi dan akses dari masyarakat atau sekelompok organisasi kepada pemerintah terhalangi seperti yang terjadi di Mexico dimana telah terbukti lebih dari puluhan jurnalis terbunuh dan terancam, hal ini menjadi isu khusus untuk dibahas dan diperjuangkan oleh para aktivis dimana hal ini menjadi sebuah *boomerang pattern* karena kurangnya akses dari pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat atau sekelompok organisasi mencari bantuan ke luar negeri atau lebih tepatnya kepada *Committee to Protect Journalist*.

Gambar 1.1

Boomerang Pattern**c. Analisis Kebijakan**

Jika advokasi dimaknai sebagai sebuah upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik agar sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perubahan tersebut, maka salah satu kerangka analisis yang dapat digunakan untuk memahaminya ialah dengan melihat kebijakan tersebut sebagai sebuah sistem hukum (*system of law*) (Azizah, 2014). Dalam hal ini penulis menggunakan Analisis Kebijakan sebagai cara CPJ untuk mengakhiri impunitas dan kekerasan terhadap jurnalis karena dilihat dari pasal-pasal terkait kebebasan berekspresi di Meksiko yang harus lebih ditegakkan.

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN**A. Boomerang Pattern**

Dalam *boomerang pattern* tersebut *Ampretur* dan *Justice in Mexico, Reporter Without Borders (RSF), International Federation of Journalist (IFJ), Civic Society, Club de Periodistas de Mexico, Escuela de Periodismo Carlos Septién García, Ampretur* dan para jurnalis yang membentuk kelompok lokal di Meksiko menutup akses ke pemerintah atau melakukan *Blockage* sebagai bukti protes mereka terhadap pemerintah Meksiko yang tidak menangani permasalahan kekerasan terhadap jurnalis dan tidak melanjutkan penelusuran terkait pelaku kriminal terhadap jurnalis, mereka mencari bantuan dan memberikan informasi mereka terkait hal yang sedang terjadi di Meksiko ke organisasi Transnational yang berada diluar Meksiko seperti *Committee to Protect Journalist*.

CPJ yang memiliki headquarter di Amerika Serikat menanggapi hal tersebut memberikan advokasi terhadap pemerintah amerika dan Meksiko agar menanggapi permasalahan tersebut. Selanjutnya pemerintah amerika dan organisasi pemerintahan

yaitu *Inter-American Commission on Human Rights (IACHR)* dan *U.N. Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)*, kedua pihak ini sama-sama memberikan pressure terhadap pemerintah Meksiko untuk menangani permasalahan tersebut dengan serius.

Dalam praktiknya Boomerang Pattern tentu sebuah LSM menggunakan cara advokasi untuk dapat mencapai tujuannya yaitu menggunakan empat strategi jaringan yang telah dikemukakan oleh Keck Sikkink dalam teori *Transnational Advocacy Network*.

B. Strategi Jaringan

Dalam *boomerang pattern* tersebut *Ampretur* dan *Justice in Mexico, Reporter Without Borders (RSF)*, *International Federation of Journalist (IFJ)*, *Civic Society, Club de Periodistas de Mexico, Escuela de Periodismo Carlos Septién García, Ampretur* dan para jurnalis yang membentuk kelompok lokal di Meksiko menutup akses ke pemerintah atau melakukan *Blockage* sebagai bukti protes mereka terhadap pemerintah Meksiko yang tidak menangani permasalahan kekerasan terhadap jurnalis dan tidak melanjutkan penelusuran terkait pelaku kriminal terhadap jurnalis, mereka mencari bantuan dan memberikan informasi mereka terkait hal yang sedang terjadi di Meksiko ke organisasi Transnational yang berada diluar Meksiko seperti *Committee to Protect Journalist*.

CPJ yang memiliki headquarter di Amerika Serikat menanggapi hal tersebut memberikan advokasi terhadap pemerintah Amerika dan Meksiko agar menanggapi permasalahan tersebut. Selanjutnya pemerintah Amerika dan organisasi pemerintahan yaitu *Inter-American Commission on Human Rights (IACHR)* dan *U.N. Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)*, kedua pihak ini sama-sama memberikan pressure terhadap pemerintah Meksiko untuk menangani permasalahan tersebut dengan serius.

Dalam praktiknya Boomerang Pattern tentu sebuah LSM menggunakan cara advokasi untuk dapat mencapai tujuannya yaitu menggunakan empat strategi jaringan yang telah dikemukakan oleh Keck Sikkink dalam teori *Transnational Advocacy Network*.



C. Strategi Jaringan

Keck dan Sikkink telah mengembangkan tipologi yang bernuansa tentang jenis taktik atau strategi yang digunakan jaringan untuk menganalisa proses advokasi dan strategi tersebut terbagi menjadi empat: *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, dan *Accountability Politics*

Dalam implementasinya menggunakan empat strategi advokasi jaringan transnasional yang dikemukakan oleh Keck dan Sikkink terhadap *Committee to Protect Journalist*

1. Information Politics

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Keck dan Sikkink (1998) penjelasan terkait informasi sangat penting untuk efektivitas sebuah jaringan karena, "mereka memberikan informasi yang tidak akan tersedia, dari sumber yang mungkin tidak didengar" seperti pada kasus pemerintah yang mungkin tidak akan memblow-up atau mungkin para jurnalis telah terkebiri haknya untuk menjalankan pekerjaannya atau bahkan lebih buruk lagi masyarakat tidak diberikan haknya untuk bersuara. Bahkan, dengan memenuhi peran sumber informasi alternatif dan dengan memberikan kesaksian tambahan dari para korban, aktor non-negara seperti kelompok-kelompok advokasi transnasional dan jaringan ini mendapatkan pengaruh yang mengarah pada efektivitas.

Dalam hal ini, CPJ melibatkan pemberitahuan peringatan (*Alert*) dan laporan (*Report*) kasus di situs Web-nya dan mengirimkannya ke daftar kontak yang luas.

Dokumen-dokumen ini berisi informasi tentang serangan terhadap jurnalis atau pelanggaran kebebasan pers yang seharusnya tidak tersedia bagi masyarakat luas. Seringkali, itu juga berisi kesaksian dari wartawan dan editor yang telah menjadi korban.

Namun, untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen ini cukup persuasif untuk menggerakkan aktor-aktor politik dan sosial menuju perubahan, sangat penting bahwa dokumen tersebut harus memiliki kejelasan, yang berisi pesan dengan kekuatan yang menarik bagi prinsip-prinsip bersama (Keck & Sikkink, 1998). CPJ membawakan sebuah kasus dengan menghasilkan dokumen yang ditulis seperti laporan berita dan mbingkainya sehingga menarik bagi "konstituensi global" yang luas. Seluruh laporan kasus yang ditulis oleh CPJ sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Associated Press atau dengan kata lain, mereka menulis dalam gaya AP. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pembaca dapat terbiasa dengan format laporan.

Pada dasarnya, jaringan dan kelompok berusaha untuk menyelidiki masalah dan kemudian memperingatkan pers dan pembuat kebijakan (Keck & Sikkink, 1998). Bahkan, proses "mempromosikan perubahan dengan melaporkan fakta" ini juga telah digambarkan sebagai "metodologi hak asasi manusia" (Thomas, 1993).

Dalam kasus CPJ, metodologi ini sangat relevan karena organisasi ini berisikan sekelompok jurnalis yang berusaha untuk melindungi rekan-rekan mereka dengan menyelidiki kasus-kasus pelecehan dan serangan terhadap jurnalis, dan kemudian memperingatkan pers secara umum dan pembuat kebijakan untuk memobilisasi opini populer dan pada akhirnya menghasilkan perubahan yang akan meningkatkan kondisi kebebasan pers serta memastikan keamanan jurnalis.

Seperti yang dikatakan Joel Simon, direktur eksekutif CPJ, "Kami bukan pengacara atau pengawal, tetapi seperti jurnalis yang meliput sebuah kisah besar. Kami melakukan penelitian berdasarkan kasus, tanpa menjadi badan penelitian. Wartawan dan yang lainnya menghubungi kami saat dalam kesulitan. Kami melaporkan serangan dan pelanggaran terhadap mereka, yang dinegaranya sendiri tidak mengambil sikap atas kasus tersebut. Kami mengeluarkan siaran pers yang meningkatkan kekhawatiran ketika kami menemukan berita tentang wartawan yang menghadapi masalah dan menghadiri persidangan di seluruh dunia, untuk mengingatkan korban dan hakim bahwa dunia sedang menonton" (Tehelka, 2010)

Selain itu, Keck dan Sikkink (1998) menunjukkan bahwa informasi yang diberikan oleh jaringan dan kelompok harus dapat diandalkan dan didokumentasikan dengan baik atau jika tidak maka sebuah organisasi tidak akan memiliki kredibilitas. Itu juga harus tepat waktu dan dibuat dramatis namun tetap sesuai realita agar menjadi efektif.

Penekanan pada keandalan dan kredibilitas mirip dengan fungsi organisasi berita dan ini menambah deskripsi Simon tentang CPJ sebagai kelompok jurnalis yang menggunakan alat jurnalisme investigatif untuk membawa perubahan. Hal ini mengungkapkan bahwa CPJ memiliki standar kredibilitas dan akurasi yang sangat tinggi. Misalnya, dalam kasus peringatan dan laporan kasus, sangat penting untuk mengidentifikasi setidaknya dua sumber informasi independen. Ini sangat penting di era teknologi informasi saat ini dan siklus berita 24 jam, ketika berita yang diterbitkan oleh satu organisasi sering diambil dan diulang kata demi kata oleh yang lain. Oleh karena itu, penekanan pada dua sumber independen memastikan tingkat akurasi yang lebih tinggi.

Selain itu, staf program dilarang memasukkan laporan yang dihasilkan oleh kelompok advokasi lain seperti *Reporters Without Borders* atau *International Federation of Journalists* sebagai sumber untuk laporan CPJ. Ini adalah langkah tambahan yang diambil untuk menjamin pelaporan yang independen dan akurat.

Hubungan dengan kelompok-kelompok lokal sangat penting karena, sebagaimana ditunjukkan oleh Keck dan Sikkink (1998), sebagian besar organisasi non-pemerintah tidak mampu mempertahankan jaringan anggota staf yang luas di banyak negara. Menempa hubungan dengan grup lokal adalah satu-satunya cara untuk memastikan pertukaran informasi secara teratur dengan biaya rendah dan terjangkau.

CPJ memelihara koneksi yang luas dengan beberapa kelompok lokal. Di Mexico misalnya, ia bekerja dengan *Ampretur* dan *Club de Periodistas de Mexico*, serta *Escuela de Periodismo Carlos Septi3n Garc3a*.

Dalam mengumpulkan informasi CPJ mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Dalam beberapa kasus, ini adalah akun tangan pertama yang diterima langsung dari jurnalis atau rekan-rekannya atau kelompok kebebasan pers setempat. Juga, anggota staf program mengikuti berita lokal sebagian besar dengan membaca sumber berita lokal secara online.

Selama tahap pengumpulan informasi, kegiatan penting adalah untuk menentukan apakah kasus tersebut termasuk dalam mandat CPJ - misalnya, jika korban memang seorang jurnalis, sebagaimana didefinisikan oleh CPJ dan atau jika ia memang menjadi korban karena aktivitasnya sebagai jurnalis. Di zaman blogger dan media terdesentralisasi, perbedaan ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Dalam hal ini CPJ menangani berdasarkan kasus per kasus menggunakan parameter yang telah ditentukan.

Selain mengumpulkan informasi dengan cara yang dijelaskan di atas, CPJ juga menyelenggarakan misi pencarian fakta ke negara-negara yang sulit untuk mendapatkan informasi dari sumber lain.

Agar dapat meningkatkan kesadaran akan sebuah kasus, setelah informasi diverifikasi CPJ akan untuk mempublikasikan informasi ini secara luas. Salah satu cara terpenting untuk mempublikasikan informasi adalah dengan mengirim email laporan (*report*), biasanya dalam bentuk peringatan (*alert*) berita ke daftar kontak yang luas yang mencakup kelompok-kelompok kebebasan pers, kelompok hak asasi manusia, organisasi media, jurnalis dan lainnya.

Kepada media profesional juga dikirimkan ke kantor pembuat kebijakan dan pejabat pemerintah terkait. Selain itu, laporan ini juga disiapkan di situs Web CPJ. Baru-baru ini, CPJ memasukkan laporan ke media sosial ke dalam upaya publisitas mereka dan banyak laporan juga dimuat di Facebook dan Twitter.

Jika pada suatu kasus CPJ percaya bahwa terindikasi ada pola "kasus yang sangat mengerikan" (Adams, 2004) di negara tertentu, ia akan mengirim surat protes kepada pemerintahnya. Tidak seperti peringatan, surat protes dikirim dengan frekuensi yang jauh lebih sedikit dan sering ditujukan kepada pejabat pemerintah, termasuk pejabat tinggi seperti bahkan Presiden. Selain itu, surat-surat ini juga ditujukan kepada A.S. perwakilan di negara itu dan perwakilan negara di AS

Setiap tahun, CPJ menghasilkan "panduan referensi untuk kebebasan pers di seluruh dunia, memberikan analisis faktual dan tidak memihak tentang kondisi media di lebih dari 100 negara" (CPJ, 2009) berjudul "*Attack on Pers*". Ini adalah panduan

referensi yang didistribusikan secara luas sebagai buku serta diposting secara online di situs web organisasi.

Selain mendistribusikan laporan dan publikasi, CPJ juga meningkatkan kesadaran tentang masalah kebebasan pers dengan berkolaborasi dengan media arus utama. Faktanya, laporan dan temuan CPJ sering dikutip dalam media arus utama (Lihat CPJ, 2010). Juga, CPJ bertemu dengan pejabat pemerintah dan pembuat kebijakan, CPJ juga melakukan misi internasional, berdiskusi dengan organisasi lain dan berpartisipasi dalam konferensi, mengadakan panel diskusi untuk terlibat dalam politik informasi.

2. Symbolic Politic

Menurut Keck dan Sikkink (1998) keterlibatan dalam *Symbolic Politic* adalah bagian integral dari proses persuasi yang memungkinkan jaringan dan kelompok advokasi untuk meningkatkan kesadaran. CPJ juga menggunakan kekuatan simbol untuk memobilisasi opini populer.

Penggunaan ini paling sering tercermin dalam penggunaan foto-foto yang kuat di situs web organisasi dan publikasi lainnya. Sebagai contoh, foto sampul untuk laporan tahunan CPJ untuk tahun 2010 menggambarkan seorang wanita muda dengan lelucon merah di mulutnya. Tulisan itu berbunyi, "Seorang jurnalis menutup mulutnya untuk memprotes serangan kekerasan terhadap anggota media oleh dugaan pendukung Presiden Hugo Chavez di Venezuela" (CPJ, 2010). Demikian pula, foto sampul depan edisi 2009 dari Serangan pada Pers (*Attack on Pers*) menggambarkan foto seorang jurnalis (fotografer AP Dario Lopez-Mills, dalam kasus ini) dipojokkan oleh polisi bersenjata. Dia meliput protes yang mengikuti kudeta presiden di Honduras (CPJ, 2009). Juga, foto-foto jurnalis yang sudah dikenal digunakan dalam kasus terbaru dan laporan khusus untuk mengingatkan audiens, jurnalis yang menjadi korban karena pekerjaan mereka. Gambar-gambar ini adalah gambaran yang jelas tentang bahaya nyata yang dihadapi oleh jurnalis dan pelanggaran mengerikan terhadap kebebasan pers.

Gambar 2.4



<https://cpj.org/images/cpj-logo.png>

Di sisi lain, logo CPJ yang merupakan akronim organisasi, CPJ dengan nyala api di atas huruf J, mewujudkan "citra harapan dan kemajuan" dan "menunjukkan bahwa CPJ adalah cahaya penuntun dalam kegelapan bagi jurnalis di seluruh dunia" (Adams, 2004, hlm. 56).

CPJ juga menggunakan tanggal dan peringatan populer sebagai simbol untuk kegiatan kesadaran kebebasan pers. Misalnya, pada Hari Kebebasan Pers Sedunia (03 Mei) CPJ memiliki jurnalis lepas Danielle Shapiro yang menulis blog tentang bahaya yang dihadapi oleh jurnalis lokal dan pekerja yang sering bekerja dengan koresponden asing tetapi jarang mendapatkan perhatian dan pujian yang layak (Shapiro, 2010). Seperti yang disebutkan Shapiro di blognya, “Dari semua jurnalis yang telah meninggal dunia karena pekerjaan mereka sembilan-puluh persen adalah penduduk setempat, menurut penelitian CPJ. Adalah umum bahwa kasus kematian mereka tidak pernah ditemukan dituntut dan dihukum pelakunya.” Dengan adanya usaha kegiatan kampanye organisasi CPJ berharap dapat menyadarkan publik bahwa penyebab kematian dan kekerasan terhadap jurnalis lokal dan pekerja media ini adalah bagian penting dari (lihat CPJ, 2010) dan terbukti dari contoh di atas bahwa CPJ menggunakan kekuatan simbolisme untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah ini.

Demikian pula, hanya tiga hari sebelum Hari Kebebasan Pers Dunia, CPJ juga merilis laporan khusus berjudul “*Ten Journalist Murder Cases to Solve*”, 10 Kasus Jurnalis untuk Dipecahkan pada dua-puluh sembilan April 2010, menentang otoritas di 10 negara yang berbeda termasuk Meksiko untuk membawa keadilan dan membalikkan budaya impunitas (CPJ, 2010). Laporan ini tidak hanya membantu menekankan kembali kasus-kasus besar, termasuk satu kasus dari Burkina Faso 1998, tetapi juga berfungsi sebagai kesempatan untuk mempublikasikan Kampanye Global Melawan Impunitas “*Campaign on Impunity*” dari CPJ sendiri.

CPJ juga menggunakan peringatan (*Alert*) sebagai simbol untuk mengingatkan orang-orang tentang serangan masa lalu terhadap jurnalis. Dapat dicatat bahwa *Symbolic Politic* paling umum digunakan dalam protes kelompok besar (Khagram, et al., 2002).

3. Leverage Politics

Leverage Politics sering kali mencakup perubahan kebijakan oleh aktor-aktor sasaran seperti pemerintah, lembaga keuangan internasional dan lain-lain, Keck dan Sikkink (1998) berteori bahwa untuk jaringan dan kelompok akan peduli, jika mendapatkan pengaruh dengan lembaga-lembaga ini sehingga mereka harus mampu untuk "menekan" dan "membujuk" mereka. Terlibat dalam politik pengungkitan memungkinkan kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk mendapatkan pengaruh yang seharusnya tidak mungkin terjadi dan oleh karena itu, penting bahwa kelompok tersebut dapat mengidentifikasi beberapa poin pengungkit material atau moral untuk keberhasilan strategis. Faktanya, sebagaimana ditunjukkan oleh Keck dan Sikkink (1998), isu-isu hak asasi manusia dapat dinegosiasikan karena praktik-praktik HAM terkait dengan militer atau bantuan keuangan atau hubungan diplomatik bilateral. Tentu saja, kelompok-kelompok hak asasi manusia harus membuat isu-isu itu menonjol dengan menggunakan informasi dan politik simbolik sebelum anggota jaringan yang lebih kuat dapat menghubungkan isu-isu itu dengan sesuatu yang bernilai: “Uang, perdagangan atau prestise”.

Dalam kasus Meksiko, pengaruh moral memainkan peran penting dalam perjuangan untuk hak kebebasan pers. Seperti dengan memberikan predikat kepada Negara Meksiko dengan sebutan negara paling berbahaya untuk para jurnalis di Amerika Latin, yang mana hal tersebut akan menjadi sebuah penekanan pada moral di negara Meksiko terhadap pandangan dari negara lain.

4. Accountability Politics

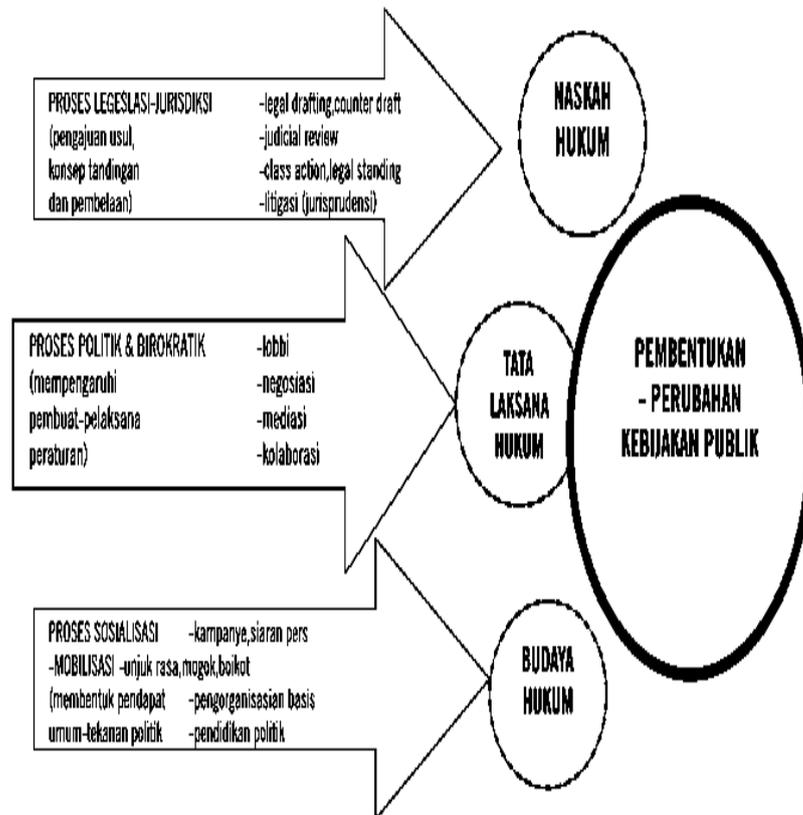
CPJ terlibat dalam politik akuntabilitas dengan secara terbuka untuk mengingatkan pemerintah dan pembuat kebijakan tentang komitmen mereka sebelumnya terhadap kebebasan pers dan memastikan bahwa mereka tetap menjalankan pembicaraan. Misalnya, pada setiap *Special Report* Meksiko selalu disertakan dengan rekomendasi yang mana hal tersebut kembali untuk mengingatkan berbagai hal yang pemerintah Meksiko dan pihak berwenang telah sampaikan dan sepakati. Setiap rekomendasi ditujukan keseluruhan seperti Presiden Meksiko, Pengacara Umum, *State Authorities*, dan Organisasi-organisasi baik lokal Meksiko maupun AS.

Direct Assistance/ Journalist Assistance Program. Terlepas dari metode-metode yang disebutkan di atas, CPJ juga mencoba membantu para jurnalis yang kesusahan dengan memberikan mereka bantuan keuangan dan non-keuangan langsung melalui program Bantuan Jurnalis. Dipimpin oleh Sheryl Mendez, program ini mengelola dana untuk bantuan darurat kepada jurnalis dan ketika dibutuhkan, bekerja dengan pemerintah dan lembaga internasional untuk membantu jurnalis mengamankan status pengungsi atau penerima suaka dan juga menyediakan dukungan logistik bagi mereka untuk pemukiman kembali di pengasingan (CPJ, 2010). Menurut situs web CPJ, beberapa layanan yang disediakan oleh program Jurnalis Asisten tercantum di bawah ini:

- a. Membantu mendapatkan perawatan medis untuk wartawan setelah serangan brutal sebagai balasan atas pekerjaan mereka, atau untuk jurnalis yang menderita penganiayaan di penjara.
 - b. Para jurnalis pendukung yang dipaksa bersembunyi atau pindah ke dalam negara mereka untuk menghindari ancaman dari pejabat setempat, milisi, atau gerombolan penjahat.
 - c. Berkontribusi pada dana legal untuk jurnalis yang menghadapi penjara.
 - d. Mengevakuasi jurnalis yang berisiko ke tempat penampungan sementara.
 - e. Memberikan dukungan untuk keluarga jurnalis yang dipenjara
- Dapat dicatat bahwa program Asisten Jurnalis tidak dianggap sebagai kegiatan advokasi melainkan mendukung kegiatan advokasi khas CPJ.

D. Analisis Kebijakan

Unsur-unsur dan proses pembuatan kebijakan publik



1. *Naskah Hukum*

CPJ tidak memiliki pembentukan secara rinci sebuah legal drafting yang diusulkan untuk merubah atau memperbaiki pasal namun, terdapat dokumen yang ditemui berupa letter dan rekomendasi kepada pemerintah Meksiko, yaitu

Kepada Presiden Enrique Peña Nieto

1. Berkomitmen secara terbuka untuk menangani impunitas dalam kejahatan terhadap kebebasan berekspresi, berjanji untuk menyelesaikan kejahatan ini, dan menempatkan keselamatan dan perlindungan jurnalis sebagai prioritas dalam agenda pemerintah Anda selama sisa waktu Anda di kantor.

2. Gunakan kekuatan penuh Anda untuk memastikan bahwa semua warga negara, termasuk anggota pers, dapat menggunakan hak mereka untuk kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 6 dan 7 Konstitusi.

3. Memastikan bahwa pejabat penegak hukum federal bertanggung jawab atas semua serangan terhadap pers yang berada dalam yurisdiksi mereka dan mengarahkan pejabat federal untuk menyelidiki kasus-kasus ini secara menyeluruh dan menuntut para pelaku hingga sejauh mungkin dari hukum.

4. Gunakan pengaruh Anda untuk memastikan bahwa kantor Penuntut Khusus Federal untuk Kejahatan Terhadap Kebebasan Bereksprei (FEADLE)

memiliki wewenang dan sumber daya yang memadai untuk menerapkan hukum secara efektif.

5. Memastikan bahwa mekanisme perlindungan memberikan bantuan yang efektif kepada jurnalis yang berisiko dan meningkatkan pencegahan untuk menghindari serangan mematikan

Untuk Jaksa Agung

1. Meminta pertanggungjawaban kantor Penuntut Khusus Federal untuk Kejahatan Terhadap Kebebasan Berekspreasi (FEADLE) atas kegagalan untuk menyelidiki kejahatan ini dan menuntut mereka yang bertanggung jawab.

2. Pastikan bahwa pejabat penegak hukum federal bertanggung jawab atas semua serangan terhadap pers yang berada dalam yurisdiksi mereka saat ini di bawah hukum. Arahkan pejabat penegak hukum federal untuk menyelidiki kasus-kasus ini secara menyeluruh dan menuntut para pelaku hingga tingkat penuh dari hukum.

3. Gunakan sumber daya penuh dari kantor Anda untuk mendapatkan penuntutan yang berhasil dalam kasus José Moisés Sánchez Cerezo, Gregorio Jiménez de la Cruz, Marcos Hernández Bautista, dan jurnalis yang terbunuh lainnya di mana tersangka telah diidentifikasi dan kemajuan telah dibuat dalam penyelidikan.

4. Memberikan pelatihan kepada jaksa yang ditugaskan untuk kejahatan terhadap kebebasan berekspreasi. Pastikan bahwa pelatihan ini membahas masalah unik yang dihadapi wartawan dan menyoroti peran vital yang dimainkan oleh pers bebas.

5. Bekerja sama sepenuhnya dengan jaksa agung negara bagian dalam penyelidikan serangan terhadap pers saat ini. Menuntut agar otoritas negara bekerja sama dan berkomunikasi sepenuhnya dengan kantor Anda.

6. Memastikan bahwa dalang yang memerintahkan pembunuhan jurnalis dikejar dan dihukum selain dari mereka yang melakukan pembunuhan.

Poin-poin rekomendasi tersebut disampaikan CPJ melalui letters dan special report yang setiap tahunnya diperbaharui. Sebagai pressure group CPJ menekan pemerintah dan mengawasi setiap kebijakan yang dibuat. Dengan diadakannya rekomendasi ini CPJ berharap jika pada pasal enam dan tujuh konstitusi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang tertulis dan dengan adanya penekanan ini CPJ berharap agar pemerintah Meksiko memberi perhatian terhadap tingginya kasus impunitas dan kurangnya perlindungan terhadap jurnalis di Meksiko yang secara tidak langsung hal tersebut karena bermasalahnya pasal-pasal tersebut.

2. Tata Laksana Hukum

Dalam tata laksana hukum dapat terbagi menjadi dua yaitu dapat berupa seminar ilmiah dan analisis kebijakan. Telah banyak organisasi dan kelompok

masyarakat seperti *freedom house*, *reporter without borders* dan *justice in mexico*, yang mempertanyakan pasal enam dan tujuh konstitusi tersebut, organisasi-organisasi tersebut melakukan analisis kebijakan melalui publikasi yang nantinya menjadi ruang diskusi bersama, seperti yang diadakan oleh *Committee to Protect Journalist* yang menyampaikan bahwa terdapat banyak sekali kasus yang seharusnya sudah diatur dalam pasal enam dan tujuh konstitusi tersebut, seharusnya jika memang berjalan baik, angka impunitas dan kejahatan terhadap jurnalis di Meksiko tidak setinggi ini.

CPJ melakukan analisis kebijakan sebagai berikut

Kebebasan berekspresi ditetapkan dalam Pasal 6 dan 7 konstitusi, dan ada sejumlah mekanisme hukum yang dirancang untuk memastikan keselamatan dan kebebasan jurnalis untuk beroperasi. Namun, terlepas dari undang-undang pada tahun 2013 yang memfasilitasi transfer kejahatan terhadap jurnalis ke sistem penuntutan federal, impunitas untuk kejahatan ini tetap menjadi norma pada tahun 2015, karena pejabat federal telah membuktikan tidak mau atau tidak mampu menghentikan atau menghukum penghitungan pembunuhan yang terus meningkat. Kantor Kejaksaan Khusus untuk Kejahatan terhadap Kebebasan Berekspresi (FEADLE) ragu-ragu untuk menegaskan yurisdiksinya atas kejahatan tersebut tanpa persetujuan pejabat negara. Banyak pejabat pemerintah menolak potensi motif terkait jurnalisisme untuk serangan dan ancaman dengan tergesa-gesa, sering menyebut kehidupan pribadi jurnalis sebagai motif kematian mereka meskipun ada bukti yang bertentangan. Mengingat skala impunitas yang sedang berlangsung, CPJ memberikan peringkat Meksiko pada peringkat kedelapan di dunia dalam Indeks Impunitas Global 2015.

Meksiko mencemarkan nama baik pencemaran nama baik di tingkat federal pada tahun 2007, dan sejumlah negara telah menghapuskan undang-undang pencemaran nama baik pidana mereka sendiri, termasuk negara bagian Meksiko - negara yang paling padat penduduknya - pada tahun 2012. Namun demikian, undang-undang pencemaran nama baik pidana tetap ada dalam undang-undang di 12 dari 32 negara bagian, dan kedua hukum pidana dan perdata terus digunakan untuk mengintimidasi wartawan.

Meksiko mengesahkan Undang-Undang Kebebasan Informasi pada tahun 2002, dan amandemen 2007 untuk Pasal 6 konstitusi menyatakan bahwa semua tingkat pemerintahan akan diminta untuk membuat informasinya terbuka untuk umum. Namun, informasi dapat ditahan sementara jika dianggap untuk kepentingan umum, dan mengakses informasi seringkali merupakan proses yang memakan waktu dan sulit dalam praktiknya.

Undang-Undang Telekomunikasi dan Penyiaran Federal, yang dikenal sebagai "*Ley Telecom*," yang ditandatangani oleh Presiden Enrique Peña Nieto pada Juli 2014, terus menuai kritik karena mengancam kebebasan berekspresi. Meskipun memfasilitasi persaingan yang lebih besar antara stasiun televisi dan penyedia telekomunikasi, beberapa ketentuannya memberi pemerintah memperluas kekuasaan pengawasan tanpa pengawasan yudisial.

Di bawah ketentuan undang-undang, pemerintah dapat mewajibkan penyedia layanan internet (ISP) dan penyedia layanan seluler untuk menyimpan data pengguna setidaknya selama dua tahun, dan untuk memberikan catatan komunikasi terperinci

kepada agen keamanan (termasuk polisi, intelijen, dan agen militer) tanpa peradilan. menjamin. Catatan-catatan semacam itu secara teoritis dapat memungkinkan pihak berwenang untuk mengidentifikasi atau memantau pelapor, sumber jurnalis, dan individu yang terlibat dalam ekspresi politik. Selain itu, Pasal 190 Ley Telecom memberi wewenang pada "otoritas yang sesuai" dalam pemerintah Meksiko untuk meminta penangguhan layanan telekomunikasi untuk "menghentikan kejahatan." Kelompok-kelompok masyarakat sipil telah menyatakan keprihatinan bahwa pihak berwenang dapat menyalahgunakan ketentuan untuk batasi ekspresi pada saat-saat kritis.

Kritik meningkat ketika Federal Telecommunications Institute (IFT), sebuah badan pengatur yang dibentuk oleh Ley Telecom, menerbitkan peraturan pelaksana undang-undang tersebut pada bulan Desember 2015. Kelompok pengawas kebebasan pers Pasal 19 mencatat bahwa pedoman tersebut memperluas kapasitas pengawasan pemerintah lebih jauh, namun gagal untuk termasuk sistem pengawasan. Sementara itu, laporan selama tahun ini mengenai kontrak pemerintah Meksiko dengan vendor keamanan swasta domestik dan Tim Pengawasan perusahaan Italia menganjurkan bahwa pengawasan pemerintah tersebar luas baik di tingkat federal maupun negara bagian.

Perkembangan ini mendorong koalisi organisasi masyarakat sipil untuk menantang konstitusionalitas Ley Telecom. Meskipun pengadilan federal membantah argumen koalisi bahwa undang-undang tersebut melanggar hak asasi manusia dan privasi yang dilindungi secara konstitusional, pengadilan banding menerima kasus tersebut dan meneruskannya ke Mahkamah Agung untuk ditinjau pada Agustus 2015. Keputusan akhir masih menunggu keputusan pada akhir tahun.

Komponen persaingan Ley Telecom, yang dibangun berdasarkan amandemen konstitusi terkait yang diadopsi pada 2013, memberdayakan IFT untuk memaksa konsesi dari perusahaan telekomunikasi dan jaringan televisi yang ditetapkan sebagai dominan di pasar masing-masing. Sebagai contoh, para pemain dominan akan diwajibkan untuk memberikan pesaing akses yang lebih kecil ke infrastruktur dan sistem distribusi mereka. Advokat untuk stasiun radio komunitas, yang cenderung melayani komunitas yang terpinggirkan secara politik dan ekonomi dan secara teratur ditargetkan untuk ditutup karena penyiaran ilegal, awalnya mencirikan undang-undang ini sebagai suatu regresi. Namun, pada Mei 2015, para advokat menyambut baik perizinan beberapa stasiun komunitas.

Siapa pun dapat menjadi jurnalis dan berlatih jurnalis di Meksiko. Lisensi profesional tidak diperlukan, dan durasi karier jurnalis tergantung pada faktor-faktor kontekstual seperti keadaan industri, kesehatan keuangan outlet media individu, dan agresi oleh aktor negara atau non-negara.

Sejumlah organisasi kebebasan pers dan asosiasi wartawan beroperasi di Meksiko, tetapi mereka menghadapi peningkatan intimidasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada bulan Februari 2015, tiga situs web Article 19 dilanda serangan cyber yang menjadikannya offline selama satu minggu penuh. Pada bulan Juni, kantor-kantor kelompok pemantauan media Pusat Komunikasi Sosial Nasional (CENCOS) dirampok dan diledah.

Pihak berwenang tidak melakukan penyensoran resmi atau secara resmi memblokir konten online, tetapi outlet media menderita serangan cyber yang tidak jelas asalnya. Lydia Cacho, seorang jurnalis kritis terkenal yang pada September 2015 menerima ancaman kematian babak baru, mengancam peretasan dan penutupan sementara sebuah situs web ketika dia memberikan wawancara online langsung. Outlet online tambahan ditumbangkan oleh serangan cyber pada tahun 2015. Situs web Aristegui Noticias mengalami serangkaian serangan penolakan layanan (DDoS) yang didistribusikan pada bulan April. Centronline.mx, La Jornada de Oriente, dan Diario Cambio di Puebla, serta AVC Noticias di Veracruz, menjadi sasaran serangan serupa.

Jumlah serangan terbesar pada tahun 2015 terjadi di negara bagian Veracruz dan Oaxaca. Wartawan José Moisés Sánchez diculik di Veracruz pada Januari dan ditemukan dipenggal kepalanya dan dipenggal beberapa minggu kemudian. Sánchez adalah pendiri dan direktur surat kabar La Unión; surat kabar itu secara berkala mengkritik pihak berwenang karena kegagalan mereka merespons kegiatan kriminal setempat, yang memicu ancaman kematian dari walikota kota Medellin. Pada bulan Juli, aktivis dan jurnalis Veracruz Rubén Espinosa, yang telah melaporkan menerima berbagai ancaman, terbunuh di sebuah apartemen di Mexico City. Di Oaxaca, Armando Saldaña dan Filadelfo Sánchez Sarmiento masing-masing dibunuh pada Mei dan Juli. Sánchez dikenal karena liputan korupsi setempat, sementara Saldaña memusuhi geng-geng kriminal dengan laporannya.

Dalam kejahatan yang tidak termasuk dalam penghitungan CPJ, seorang direktur radio komunitas di Oaxaca, Abel Bautista Raymundo, terbunuh pada bulan April, menggambarkan pelecehan yang sering terjadi dan kurangnya perlindungan bagi jurnalis di sektor ini.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, para pejabat sering mengabaikan hubungan nyata antara kejahatan tersebut dan status korban sebagai pekerja media. Misalnya, pihak berwenang Veracruz mencirikan José Sánchez sebagai sopir taksi dan bukan sebagai jurnalis, dan kantor jaksa agung federal menawarkan pembenaran yang sama untuk tidak adanya intervensi dalam kasus tersebut. Pejabat Mexico City juga cepat menyalahkan kematian Espinosa atas dugaan kehadirannya di sebuah pesta yang menampilkan pelacur dan penggunaan narkoba. Pada akhir tahun, setidaknya satu tersangka telah ditangkap dalam kasus Saldaña; dalam kasus Espinosa, beberapa penangkapan dilakukan, tetapi advokat kebebasan pers menyerang penyelidikan karena gagal mengklarifikasi banyak pertanyaan luar biasa tentang insiden tersebut.

Selain pembunuhan, ratusan serangan tidak fatal terhadap jurnalis dan outlet pers terjadi di Meksiko setiap tahun, dengan banyak yang diduga dilakukan oleh pejabat pemerintah yang korup atau kasar. Artikel 19 mencatat 397 serangan dari berbagai bentuk, sementara Periodistasenriesgo.com, situs web yang melacak insiden kekerasan terhadap jurnalis, mencatat 90 insiden agresi. Fasilitas dari beberapa organisasi media diserang pada tahun 2015. Pada bulan Januari, penyerang yang tidak dikenal melemparkan alat peledak ke kantor El Heraldo de Córdoba di Veracruz. Serangan bersenjata lain terhadap surat kabar Veracruz terjadi pada Agustus, ketika orang-orang bersenjata menembaki kantor-kantor Presente, sebuah majalah mingguan yang bemarkas di Poza Rica. Pada bulan Februari dan Maret, kelompok-kelompok bersenjata melemparkan granat ke fasilitas Televisa di Matamoros, Tamaulipas, dalam

konteks pertempuran yang sedang berlangsung antara geng dan polisi. Secara keseluruhan, 23 dari 90 serangan yang dicatat oleh *Periodistasenriesgo.com* terjadi di Veracruz; Mexico City berada di urutan kedua dengan 14 insiden, diikuti oleh Guerrero, Oaxaca, Chiapas, dan Puebla.

Beberapa serangan terhadap jurnalis memiliki reputasi baik. Cacho, misalnya, menghadapi kampanye media sosial yang menuduhnya menerima uang dari para politisi setelah dia menulis cerita tentang blogger dan pembela hak asasi manusia Pedro Canc . Advokat pers mencatat bahwa jurnalis wanita sering menjadi korban dengan cara yang berbeda, termasuk melalui penggunaan ancaman seksual dan kekerasan.

Wartawan menghadapi hambatan yang signifikan ketika berusaha menerima perlindungan melalui mekanisme resmi pemerintah federal untuk melindungi jurnalis dan pembela hak asasi manusia, yang diciptakan pada 2012. Rendahnya tingkat pendanaan dan kemauan politik, persaingan birokrasi, dan kurangnya pelatihan adalah beberapa tantangan yang memengaruhi pemerintah federal. Kemampuan pemerintah untuk melindungi jurnalis. Jurnalis dan pembela hak asasi manusia yang mencari penilaian risiko dan langkah-langkah perlindungan dilaporkan mengalami penundaan dan perlindungan yang tidak memadai, meskipun beberapa memang mendapat manfaat dari program selama 2015, dan tumpukan kasus telah berkurang. Meskipun demikian, masalah yang sedang berlangsung disorot dalam sebuah studi independen yang dilakukan pada 2015 oleh Espacio OSC, sebuah koalisi organisasi masyarakat sipil.

3. Budaya Hukum

Pada proses sosialisasi dan mobilisasi ini CPJ seperti yang sudah disebutkan sebelumnya memiliki peran sangat penting sebagai kelompok penekan, dimana CPJ melakukan aksi seperti *Campaign On Impunity* dan seperti yang telah disebutkan pada strategi advokasinya yaitu *Information politic* seperti melibatkan pemberitahuan peringatan (*Alert*) dan laporan (*Report*) kasus di situs Web-nya dan mengirimkannya ke daftar kontak yang luas. Dokumen-dokumen ini berisi informasi tentang serangan terhadap jurnalis atau pelanggaran kebebasan pers yang seharusnya tidak tersedia bagi masyarakat luas. Seringkali, itu juga berisi kesaksian dari wartawan dan editor yang telah menjadi korban, termasuk pula kritik kepada pemerintah terhadap pasal enam dan tujuh konstitusi yang hingga kini tidak atau belum merubah keadaan Meksiko menjadi lebih baik

1. Hambatan Advokasi Committee to Protect Journalis di Meksiko

Hingga kini CPJ hanya banyak memakan janji-janji palsu dan kata-kata kosong, walaupun mampu mengekstraksi komitmen verbal dan bahkan memaksa inisiasi beberapa tindakan anti-impunitas oleh pemerintah tentu saja merupakan prestasi bagi CPJ dan mitra lokalnya, bahwa fakta ini ternyata seringkali sedikit lebih banyak dari kata-kata kosong dan janji kosong yang mengurangi signifikansinya. Misalnya, meskipun FEADLE didirikan, banyak kasus yang masih terbengkalai dan hanya menyelesaikan tiga kasus saja. Demikian pula, para pemimpin lokal dan nasional sering menjanjikan dukungan mereka untuk tujuan dan berjanji untuk mengambil tindakan, tetapi dalam kenyataannya tidak banyak mendesak status quo.

Pemerintah Meksiko menanggapi segala pesan dan merespon setiap pertemuan yang diadakan oleh CPJ namun kembali lagi, hal tersebut masih menjadi isapan jempol belaka. Dimana hingga kini pembunuhan dan kekerasan terhadap jurnalis di Meksiko masih meningkat dari tahun ke tahun, dan bahkan semakin banyak kasus kejahatan yang tidak ditelusuri lebih lanjut sehingga semakin banyaknya korban dan semakin bebasnya para penjahat yang terus melakukan kejahatan karena mereka merasa aman atau bahkan para pelaku kejahatan tersebut adalah aparat.

2. Hambatan Advokasi Committee to Protect Journalis di Meksiko

Hingga kini CPJ hanya banyak memakan janji-janji palsu dan kata-kata kosong, walaupun mampu mengekstraksi komitmen verbal dan bahkan memaksa inisiasi beberapa tindakan anti-impunitas oleh pemerintah tentu saja merupakan prestasi bagi CPJ dan mitra lokalnya, bahwa fakta ini ternyata seringkali sedikit lebih banyak dari kata-kata kosong dan janji kosong yang mengurangi signifikansinya. Misalnya, meskipun FEADLE didirikan, banyak kasus yang masih terbengkalai dan hanya menyelesaikan tiga kasus saja. Demikian pula, para pemimpin lokal dan nasional sering menjanjikan dukungan mereka untuk tujuan dan berjanji untuk mengambil tindakan, tetapi dalam kenyataannya tidak banyak mendesak status quo.

Pemerintah Meksiko menanggapi segala pesan dan merespon setiap pertemuan yang diadakan oleh CPJ namun kembali lagi, hal tersebut masih menjadi isapan jempol belaka. Dimana hingga kini pembunuhan dan kekerasan terhadap jurnalis di Meksiko masih meningkat dari tahun ke tahun, dan bahkan semakin banyak kasus kejahatan yang tidak ditelusuri lebih lanjut sehingga semakin banyaknya korban dan semakin bebasnya para penjahat yang terus melakukan kejahatan karena mereka merasa aman atau bahkan para pelaku kejahatan tersebut adalah aparat.

3. Hasil advokasi Committee to Protect Journalist

Dari keseluruhan rangkaian yang telah dipaparkan diatas bahwa Committee to Protect Journalist dalam proses legislasi dan yuridiksi hukumnya memberikan sebuah rekomendasi dan penekanan terhadap pemerintah agar pasal enam dan tujuh konstitusi seperti yang di sampaikan kepada Presiden salah satunya adalah untuk menggunakan kekuatan penuh untuk memastikan bahwa semua warga negara, termasuk anggota pers, dapat menggunakan hak mereka untuk kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 6 dan 7 Konstitusi.

Lalu dalam tatalaksananya CPJ telah membuka dialog dan memberikan analisis kebijakan yang berkaitan dengan pasal enam dan tujuh konstitusi tersebut dimana sangat banyak poin-poin penting terkait impunitas yang terus dibiarkan hingga penyadapan terhadap jurnalis, serta pemerintah tidak dapat menerima berita-berita yang dapat mengusik kehidupan pribadinya.

Budaya hukum yang telah dilakukan oleh CPJ adalah sebagai kelompok penekan mereka selalu mengawasi kebijakan tersebut dan terus menyuarakan agar pemerintah menjalankan apa yang dikandung dalam pasal-pasal tersebut.

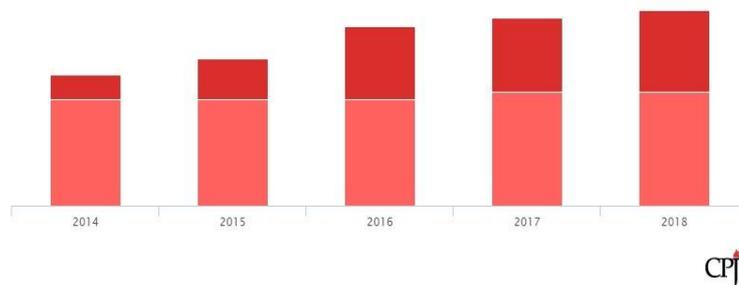
Pada 2015 pemerintah distrik federal Mexico city mengeluarkan sebuah undang-undang baru yang melindungi para pembela HAM dan jurnalis atau dapat disebut Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

del Distrito Federal. Dam hal ini diharapkan dapat menimbulkan sebuah *snowball-effects* ke negara federal lainnya di Meksiko.

Meskipun demikian dari data yang diambil dari CPJ bahwa ancaman dan korban kriminal terhadap jurnalis masih terus berlangsung bahkan angka nya terus meningkat dari tahun-ke tahun seperti pada gambar yang tertera dibawah,

Journalists Attacked in Mexico

between 2014 and 2018 / Killed/motive confirmed or Killed/motive unconfirmed or Missing



Dalam diagram tersebut terpapar dari tahun ke tahun tingkat kekerasan terhadap jurnalis terus meningkat. Dapat kita lihat bahwa usaha CPJ terus menerus dilakukan namun kembali lagi kepada pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan penentu kebijakan. Jika dikatakan sebuah advokasi kebijakan yang diusahakan oleh CPJ dan kelompok organisasi lainnya tidak berhasil bukan tidak salah namun dapat kita lihat pula respon dari pemerintah yang terkesan bungkam terhadap permasalahan kebebasan pers karena beberapa kasus diantaranya dilakukan sendiri oleh para petinggi, dan hal tersebut menjadi sebuah kekebalan hukum dan berujung pada impunitas. Dengan tanggapan secara riil yang telah diberikan oleh distrik federal Mexico city inilah yang nantinya diharapkan dapat menjadi contoh distrik federal lainnya.

KESIMPULAN

Studi ini memberikan wawasan terperinci tentang bagaimana advokasi transnasional bekerja di lapangan untuk membawa perubahan nyata di ranah internasional. Lebih khususnya, mengkaji bagaimanakah upaya advokasi CPJ dalam mencegah dan menangani kekerasan dan impunitas terhadap jurnalis di Meksiko. Studi ini mempertimbangkan bagaimana organisasi non-pemerintah seperti CPJ bekerja untuk menempatkan isu-isu tersebut dalam agenda nasional dan internasional, memengaruhi posisi diskursif dan berdampak pada perilaku negara.

Dalam tulisan ini, penulis menganalisis jika CPJ melakukan bentuk advokasi yang berupa perlindungan dan analisis kebijakan. Mirip dengan sebagian besar kelompok advokasi transnasional, fokus utama CPJ adalah pada politik informasi - yaitu mengumpulkan, mendokumentasikan dan bertukar informasi. Untuk meningkatkan efektivitas *information politics*-nya seperti *Key Campaign* mereka adalah

Impunity, diikuti *#FreeThePress*, *Freelancer Safety*, *Technology and Surveillance*, *Sports and Human Rights*, *Gender and Safety of Women Journalists*, *One Free Press Coalition*, *Safety Crossing Borders*, organisasi ini juga terlibat dalam *symbolic politics* dan *accountability politics*. Ketika dan jika langkah-langkah ini gagal, CPJ juga melakukan kegiatan yang menggabungkan pengaruh politik untuk membawa perubahan dalam kebijakan dan perilaku negara. Dan dengan hal ini CPJ juga memiliki program bantuan langsung tetapi tidak termasuk dalam daftar kegiatan advokasi karena memberikan bantuan langsung kepada wartawan individu tidak berkontribusi terhadap peningkatan jangka panjang dalam tingkat kebebasan pers atau memberikan peningkatan keselamatan bagi jurnalis yang bekerja.

Dalam pengamatan umumnya peran kelompok-kelompok kebebasan pers lokal, dan upaya-upaya kelompok-kelompok ini sangat penting untuk berfungsinya CPJ terutama dalam hal meningkatkan kesadaran dan menempatkan isu-isu dalam agenda nasional. Mereka bekerja erat tidak hanya dengan CPJ tetapi juga dengan seluruh jaringan kebebasan pers internasional secara umum dan bersama-sama memberikan upaya kolektif memungkinkan pencapaian kecil tapi layak seperti komitmen verbal dari pejabat pemerintah, seperti yang diakui oleh pejabat CPJ. Selain itu, kemitraan ini memungkinkan organisasi lokal untuk memperkuat pengaruh mereka sendiri, sesuai dengan pola advokasi bumerang atau *boomerang pattern* yang dijelaskan dalam bagian kerangka teori.

Dalam respons dari negara Meksiko, meskipun penelitian ini hanya melihat upaya advokasi CPJ antara 2014 hingga 2018 saja, peningkatan yang nyata dalam respons Negara dan lembaga-lembaganya terhadap situasi buruk kebebasan pers di Meksiko telah diperhatikan. Sebagai contoh: Seperti disebutkan sebelumnya, pembentukan FEADLE yang melindungi para jurnalis setelah CPJ menekan pemerintah Meksiko pada tahun 2005.

Memasuki pada proses Analisis Kebijakan, CPJ terus berupaya agar pemerintah Meksiko dapat menstabilkan pasal enam dan tujuh konstitusi yang menekankan pada kebebasan pers. Hal ini ditekankan mengingat angka impunitas dan kekerasan pelaku kriminal terhadap jurnalis di Meksiko terus meningkat. Dengan proses-proses yang telah dipaparkan dapat menghasilkan sebuah tanggapan positif dari Distrik Federal Meksiko city dengan membuat undang-undang baru pada 2015 mengenai perlindungan jurnalis dan aktivis HAM.

Meskipun mendapat tanggapan positif, CPJ tetap mengawasi kebijakan yang ada. Penulis menganalisis bahwa korban masih terus berjatuhan dari tahun ke tahun dengan semakin meningkatnya korban karena impunitas terus dibiarkan dan hal ini menjadi sebuah hambatan dari Advokasi CPJ yang hanya banyak memakan janji-janji palsu dan kata-kata kosong, walaupun mampu mengekstraksi komitmen verbal dan bahkan memaksa inisiasi beberapa tindakan anti-impunitas oleh pemerintah tentu saja merupakan prestasi bagi CPJ dan mitra lokalnya, fakta bahwa ini sering terjadi walaupun ternyata sedikit lebih banyak dari kata-kata kosong dan janji kosong. Misalnya, meskipun FEADLE didirikan, banyak kasus yang masih terbengkalai dan hanya menyelesaikan tiga kasus saja. Demikian pula, para pemimpin lokal dan nasional sering menjanjikan dukungan mereka untuk tujuan dan berjanji untuk mengambil tindakan, tetapi dalam kenyataannya tidak banyak mendesak status quo.

Sistem penegakan hukum dan penegakan hukum Meksiko, terutama rentan terhadap manipulasi oleh kepentingan pribadi, sistem ini secara rutin disalahgunakan oleh terdakwa yang kuat yang mengarah pada penganiayaan dan ketidakadilan. Akibatnya, beberapa tersangka sangat didakwa dan mereka yang melakukan pengadilan sehari-hari mereka dilepaskan dengan mudah. Sebagai contoh, dalam kasus José Moisés Sánchez Cerezo yang hingga kini tidak ditemukan dalangnya, walaupun telah ditemukan salah satu pembunuhnya yaitu seorang polisi yang dipenjara tiga-puluh tahun dimana dalang telah di perkirakan yaitu seorang Gubernur Javier Duarte de Ochoa namun dengan mandat dan kekuasaan jabatannya ia menjadi kebal hukum dan melarikan diri dan pula mengundurkan diri dari jabatannya sebagai seorang gubernur. Hingga kini kasus tersebut belum selesai dan terkesan tidak diselidiki lebih lanjut

Dalam kampanye global melawan impunitas inisiatif khusus ini memungkinkan untuk advokasi tingkat tinggi yang terfokus dan memiliki potensi untuk membuat dampak yang signifikan. Kampanye ini juga memastikan bahwa CPJ dapat mendedikasikan waktu, sumber daya, dan perhatian yang dibutuhkan oleh kasus seperti Meksiko. Ini juga memungkinkan strategi advokasi untuk diputuskan berdasarkan kasus per kasus sehingga menjadikannya jauh lebih efektif daripada respons yang bersifat situasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Azizah, N. (2014). *Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: LP3M UMY & Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
- Archer, C. (1983). *International Organization*. London: George Allen and Unwin.
- Anderson, J. E. (1979). *Public Policy-making*. New York: Rinehart, and Winston.
- Bennet, A. R. (1997). *International Organizations: Principles and Issues*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Carl, F. (2007). "Public Policy and The Nature of Administrative Responsibility". Cambridge: Harvard University Press.
- Cohen, D. R. (2001). *Advocacy for social justice*. Kumarian Press Inc.
- Haas, P. (1992). "Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination," *Knowledge, Power and International Policy Coordination, special issue, International Organization*. Winter.

Hass, M. (1969). *A Reader in Research and Theory*. Dalam J. N. Rosenau, *International Politics and Foreign Policy* (hal. 131). New York: The Free Press.

Holloway, R. (1985). *Establishing and Running An Advocacy NGO: A Handbook*. PACT.

Judith Goldstein and Robert Keohane, e. (1993). *Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change*. Cornell University Press.

Kauppi, P. R. (1993). *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*. . New York: Allyn & Bacon.

Kay, A. (2006). *The Dynamics Of Public Policy: Theory And Evidence*. . Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Lester, J. P. (1996). *Public Policy: An Evolution Approach*. Boston: Cengage Learning.

Sikkink, M. E. (2014). *Activist Beyond Borders*. Ithaca and London: Cornell University Press.

Situmorang. (1999). *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

SJ, J. (1984). *Filsafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Somit, A. d. (2003). *Human Nature And Public Policy: An Evolutionary Approach*. Basingstroke: Palgrave Macmillan.

Tomatimasang, R. M. (2000). *Merubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Read Books.

JURNAL

Aguilar, 4. J. (2017). *Mexican Journalist's Case Suggests Changes to Asylum Process Under Trump*. Texas Tribune.

Ahmed, A. (2018). *Using Text as Lures, Government Spyware Targets Mexican Journalist and their families*. New York: New York Times.

Alonso, E. O. (2017). *Periodistas Desconfian de Instituciones*. Mexico: La Jornada.

Beittel, J. S. (2017). Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations. *CRS Report*.

Buckley, H. (2017). *CPJ ANNUAL REPORT 2017*. New York: Committee to Protect Journalist.

Committee to Protect Journalist. (2017, October 31). Getting Away with Murder: 2017 Global Impunity Index. *Getting Away with Murder*.

Journalist, C. t. (2008). *Columbia University Library Archival Record*. Dipetik 06 19, 2019, dari Committee to Protect Journalists records, 1978-2008: <http://www.columbia.edu>

Mioli, S. H. (2016). "Mexican Governor of Veracruz Resigns to Face Corruption Charges; 17 Journalists Have Died During his Administration,". *Journalism in the Americas Blog: Knight Center for Journalism at the University of Texas at Austin*.

Mukherjee, M. (2011). Understanding transnational advocacy groups: A case study of the effectiveness of the Committee to Protect Journalists in the promotion of press freedom in the Philippines

Seelke, C. R. (2018). *Violence Against Journalists in Mexico*. Mexico: Congressional Research Service.

WEBSITE

Reporters Without Borders (RWB). (2018, April). World Press Freedom Index.

Artículo 19. (2016). Informe 2016 de Article 19. *Libertades en Resistencia*.

Committee to Protect Journalist. (2014). *CPJ ANNUAL REPORT 2014*. New York: Committee to Protect Journalist.

Committee to Protect Journalist. (2015). *CPJ ANNUAL REPORT 2015*. New York: Committee to Protect Journalist.

Committee to Protect Journalist. (2016). *CPJ ANNUAL REPORT 2016*. New York: Committee to Protect Journalist.

Committee to Protect Journalist. (2017). *CPJ ANNUAL REPORT 2017*. New York: Committee to Protect Journalist.

Freedom House. (2017). Mexico Case. *Freedom in the World*.

Goldman, F. (2015). *Who Killed Rubén Espinosa and Nadia Vera?* New Yorker.

Gracia., C. R. (2018). *Mexico's 2018 Elections*. Mexico.

Hootsen, J.-A. (2018). *Mexico's Special Prosecutor Says FEADLE Is Improving, but Impunity Continues*. CPJ.

Journalist, C. t. (2018, February Friday). *Committe to Protect Journalist CPJ*. Dipetik February Friday, 2019, dari CPJ organization web site: <https://cpj.org/about/>

La Jornada. (2018). "La Fiscalía de Chihuahua Oculca dos Tomos de la Pesquisa del Asesinato de Miroslava. La Jornada.

Laura Calderón, O. R. (2017). *Drug Violence in Mexico: Data and Analysis*. San Diego: Justice in Mexico.

Marco, R. O. (2018). “*Rubio, Colleagues Urge State Department to Address the Targeting of Journalists in Mexico,*”. Mexico.

McCarthy, N. (2018, December 19). *News*. July 2, 2019, Forbes:
<https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2018/12/19/the-deadliest-countries-for-journalists-in-2018-infographic/>

Nalvarte, P. (April 24, 2018.). “Authorities Arrest Suspect in Killing of Mexican Journalist Javier Valdez Almost One Year After. *Journalism in the Americas Blog*.

No Excuse. (2017). *CPJ Special Report*.

OHCHR. (2017). “*Preliminary Observations by the U.N. Special Rapporteur on Freedom of Expression and the Special Rapporteur on Freedom of Expression of the IACHR Following Their Joint Visit to Mexico,*”. Washington: United Nation.

Perloth, A. A. (2017). *Using Texts as a Lure, Government Spyware Targets Mexican Journalists and Their Families*. New York Times.

Reporter Without Borders. (2017). *More Forced Displacement of Journalists Seen in Mexico*. Mexico: Reporter Without Borders.

Reporter Without Borders. (2018, December 14). *News*. Dipetik July 2, 2019, dari Reporter Without Borders: <https://rsf.org/en/news/rsfs-2018-round-deadly-attacks-and-abuses-against-journalists-figures-all-categories>

Rodríguez, R. Z. (2016.). “Impunidad Frente al Homicidio Doloso en México,”. *Impunidad Cero*.

Rosa, L. R. (2016). *Ley de Víctimas se Ahoga en el Fracaso*. Excelsior.

U.S. Agency for International Development (USAID). (2017). *Results of Human Rights Program Evaluation*. USAID.

Washington Office on Latin America (WOLA). (2017). “WOLA’s Statement on Violence against Journalists and HumanRights Defenders in Mexico,”. *press release*. Washington: WOLA.

Witchel, E. (2018). *CPJ's 2018 Global Impunity Index spotlights countries where journalists are slain and their killers go free*. New York: Committee to Protect Journalist.

WOLA. (2016). Mexico’s Mechanism to Protect Human Rights Defenders and Journalists: Progress and Continued Challenges, . *Washington Office on Latin America (WOLA) and Peace Brigades International (PBI)*.